



Pembatik cap Temanggung mengikuti sertifikasi kompetensi untuk peningkatan mutu produksi.

KR-Zaini Arrosyid

Pembatik Cap Temanggung Ikuti Sertifikasi

TEMANGGUNG (KR) - Lembaga sertifikasi profesi batik menggelar uji sertifikasi kompetensi sumberdaya manusia (SDM) khusus batik di Temanggung. Sebanyak 40 pembatik cap di kabupaten penghasil kopi dan tembakau itu, mengikuti sertifikasi kompetensi.

Penanggung jawab Sertifikasi Kompetensi SDM Batik Rahayu Sulistyowati mengatakan, sertifikasi kompetensi batik yang diselenggarakan di Batik Rayikenes Desa Gandulan Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung ini khusus untuk skema tukang cap.

Ia mengatakan, sebenarnya ada empat skema sertifikasi kompetensi batik, yakni pembatik tulis, tukang cap, tukang gambar dan tukang pencelupan pewarna sintetis. "Untuk Temanggung kali ini mengambil skema tukang cap," katanya, Minggu (10/10).

Pihaknya mengatakan, kebetulan Lembaga Sertifikasi Profesi Batik baru ada satu di Indonesia yang berkedudukan di Semarang. "Tahun ini kami melakukan sertifikasi sebanyak 625 orang se-Indonesia. Karena situasinya masih seperti ini, banyak daerah yang belum siap kaitan-

nya dengan pandemi Covid-19," kata Rahayu yang juga Manajer Pemasaran Lembaga Sertifikasi Profesi Batik.

Dengan kompetensi, diharapkan adanya suatu pengakuan dan tidak hanya dari Temanggung, tetapi secara nasional maupun internasional. "Kami hanya sebagai pelaksana, sedangkan yang menerbitkan sertifikat adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," jelasnya.

Rahayu menyebutkan, batik sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia adalah kekayaan yang patut dijaga, terutama tidak sekadar produk batik, namun juga SDM batik. Lembaga Sertifikasi Profesi Batik hadir di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan dan memelihara kompetensi SDM batik melalui sertifikasi kompetensi.

Peserta sertifikasi kompetensi SDM Batik warga Kranggan Temanggung, Erina menyambut gembira dengan penyelenggaraan sertifikasi ini karena tidak semua orang bisa memberikan ilmunya tanpa mereka memiliki dasar yang kompeten. Untuk bisa mengajar atau memberikan pelatihan harus mempunyai sertifikat mengajar. **(Osy)-f**

PEMBERLAKUAN NIK JADI NPWP

Tak Otomatis Pemilik Dikenai Pajak

JAKARTA (KR) - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak.

"Untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus telah memenuhi syarat subjektif (termasuk sebagai subjek pajak) dan objektif (mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP)," kata Neilmaldrin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (10/10).

Dijelaskan, pemberlakuan NIK menjadi NPWP pada dasarnya akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakuan itu pun akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan

dengan basis data kependudukan, serta memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional.

Sebelumnya, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP. Namun, dalam Undang Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), fungsi NIK ditambah menjadi sekaligus sebagai NPWP bagi WP OP.

"Dengan ketentuan baru ini, maka WP OP tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP,

karena NIK tersebut sudah berfungsi sebagai NPWP," ucap Neilmaldrin seperti dilansir *Antara*.

Di sisi lain, Neilmaldrin Noor menyampaikan, Pemerintah memberlakukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

"Pemerintah memperkenalkan pengaturan baru mengenai besarnya bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak dalam satu tahun pajak sebesar Rp 500 juta, sebagai insentif tambahan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) UMK yang dikenai PPh Final," tuturnya.

Menurutnya, aturan baru tersebut diberikan dalam rangka memberikan dukungan kepada para pelaku UMK, serta untuk menciptakan keadilan antara pelaku UMK yang dikenai PPh Final dan WP OP yang dikenai

Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan umum.

Saat ini, secara umum, WP OP memperhitungkan PTKP dalam menghitung penghasilan kena pajaknya. Sedangkan, WP OP pelaku UMK yang melaporkan pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dikenai PPh Final 0,5 persen dari penghasilan bruto tanpa perhitungan PTKP.

Adapun kebijakan baru tersebut diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disetujui DPR RI untuk disahkan.

"Kebijakan baru ini merupakan wujud nyata keberpihakan Pemerintah untuk mendorong dan memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya yang menjalankan UMK," ucapnya.

(San)-f

ANTISIPASI GELOMBANG KETIGA

Faskes Tetap Dipertahankan

JAKARTA (KR) - Penularan Covid-19 saat ini sudah menurun, namun pelayanan, fasilitas kesehatan, dan ruang isolasi rumah sakit yang ada tetap harus dipertahankan. "Mohon fasilitas kesehatan yang ada tetap dipertahankan kapasitas ruangan isolasinya tetap ada, untuk mengantisipasi jika terjadi gelombang selanjutnya," ujar Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan, Yout Savitri dalam Webinar Talk RS Yarsi 'Dampak Vaksin, CT Values dan Risiko Anak' di Jakarta, kemarin.

Diakui, penularan Covid-19 saat ini memang sudah menurun. Namun pihaknya sangat mengharapkan masyarakat tetap waspada untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gelombang selanjutnya. Sebab, tidak ada yang tahu gelombang ketiga itu kapan. Karenanya seluruh pelayanan kesehatan harus tetap waspada.

Hal ini juga mengingat di negara lain sudah mengalami gelombang ketiga. Salah satunya Singapura yang mengalami lonjakan drastis kasus Covid-19. Kemenkes RI mengantisipasi ancaman gelombang ketiga Covid-19 ini dengan meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan 6M. Sesuai Surat Edaran 16/2021 disebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. **(Ati)-f**

ARAB SAUDI KIRIM NOTA DIPLOMATIK

Buka Kembali Jemaah Umrah Indonesia

JAKARTA (KR) - Sejalan dengan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik di Indonesia, membuat pemerintah Arab Saudi kembali merencanakan membuka pintu bagi jemaah umrah asal Indonesia.

Mengutip Kemlu.go.id, Sabtu (9/10), hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Ia mengatakan, pembukaan kembali umrah untuk jemaah Indonesia itu disampaikan pemerintah Arab Saudi kepada Kedutaan Arab Saudi di Jakarta melalui nota diplomatik tertanggal 8 Oktober 2021.

"Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Arab Saudi perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," papar Retno.

Menlu mengatakan, komite khusus di Arab Saudi saat ini sedang bekerja guna meminimalkan segala hambatan yang menghalangi kemungkinan jemaah Indonesia melaksanakan umrah.

Nota diplomatik itu juga menyebutkan, pembahasan mengenai prosedur serta persyaratan kesehatan untuk mengikuti umrah saat ini sudah mencapai tahap akhir. "Di dalam nota diplomatik tersebut disebutkan, kedua belah pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah," kata Retno.

Terkait dengan persyaratan yang harus dipatuhi jemaah Indonesia, Retno mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga mempertimbangkan kebijakan karantina selama lima hari.

Menurut Menlu, kebijakan tersebut diberlakukan kepada jemaah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

"Nota diplomatik juga menyebutkan, mempertimbangkan masa periode untuk karantina selama 5 hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," ujar Retno. **(Ful)-f**

VAKSINASI COVID-19, INDONESIA PERINGKAT 5

DIY Targetkan Dosis 2 Selesai Januari 2022

YOGYA (KR) - Pemda DIY menargetkan capaian vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua bisa diselesaikan pada Januari 2022 mendatang. Sebelumnya total sasaran penerima vaksinasi di DIY berjumlah sekitar 2,8 orang. Namun dengan dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang berdampak pada banyaknya mahasiswa dari luar daerah yang datang ke Yogyakarta, Pemda DIY menaikkan jumlah sasaran menjadi sekitar 3 juta orang.

"Pemda DIY menargetkan seluruh sasaran vaksinasi sebanyak 3 juta orang dapat menerima suntikan vaksinasi dosis kedua pada Januari 2022 mendatang. Untuk target 100 persen dosis pertama selesai akhir November 2021. Karena ada rentang waktu tiga bulan dari November, kami yakin target 100 persen pada Januari bisa terpenuhi," kata Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi DIY Sumadi, Minggu (10/10).

Sumadi menyatakan, secara umum vaksinasi di DIY bisa dilaksanakan dengan lancar dan tidak ada kendala berarti. Meski tidak dipungkiri masih ada masyarakat yang menolak tapi jumlah-

nya cuma sedikit. Menyikapi hal itu pihaknya terus melakukan pendekatan ke masyarakat melalui tokoh-tokoh agama maupun masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi. Biasanya mereka yang menolak itu karena termakan berita-berita yang tidak benar. Tapi setelah diberikan pemahaman pentingnya vaksinasi akhirnya mereka bisa memahami.

"Sejumlah upaya terus kami lakukan agar semua warga DIY dapat tervaksin untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal, sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Kendati sudah divaksin warga tetap kami minta tetap disiplin protokol kesehatan," katanya.

Menurut Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji, kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah 36 menjadi 155.291 kasus, Minggu (10/10). Rerata kasus positif harian 0,46 persen dengan jumlah kasus aktif 933. Pasien sembuh bertambah 75 menjadi 149.141 kasus. Sementara pasien meninggal dunia akibat Covid-19 bertambah dua menjadi 5.217 kasus.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Pemerintah Indonesia terus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 dalam rangka mewujudkan herd immunity. Percepatan ini menjadikan Indonesia masuk jajaran 10 besar negara di dunia dengan capaian vaksinasi Covid-19 terbanyak.

Menurut Menkes, Indonesia kini berada di peringkat 5 dunia dari segi jumlah orang yang sudah divaksinasi. Peringkat tersebut dicapai setelah Indonesia berhasil memberikan vaksin kepada lebih dari 90 juta orang. Capaian tersebut membuat Indonesia naik satu peringkat menyusul Jepang yang sudah memberikan vaksinasi kepada 80 juta warganya.

Dari segi jumlah orang yang sudah divaksin, Indonesia juga berhasil bertengger di peringkat keenam dunia dari segi total suntikan. Total suntikan vaksin Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 156 juta. Sedangkan stok vaksin dalam negeri Indonesia dipastikan dalam kondisi aman, karena kiriman dari luar negeri terus berdatangan melalui berbagai skema. **(Ria/Ira/San)-f**

MESKI PANDEMI SUDAH MEMBAIK

Tetap Wajib Pakai Masker

JAKARTA (KR) - Meski saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah membaik, namun risiko penyebaran virus harus tetap diwaspadai. Karena itu, Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin memakai masker serta segera melakukan vaksinasi.

"Kondisi pandemi di Indonesia saat ini sudah membaik, dapat dilihat dari data kasus aktif Covid-19 yang terus menurun yakni di bawah 30.000 kasus dan tingkat kesembuhan juga tinggi mencapai 96 persen. Namun semua pihak tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Minggu (10/10) di Jakarta.

Menurut Menkominfo, kondisi negara lain yang tengah menghadapi peningkatan kasus harus jadi pelajaran sekaligus peringatan bagi Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia

diminta tetap waspada dan tidak lengah agar risiko peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air dapat dihindari. "Saat ini perlu ada percepatan vaksinasi pada kelompok lansia yang baru mencapai 6,9 juta untuk dosis pertama dan 4,5 juta dosis lengkap, serta vaksin remaja yang 3,9 juta dosis pertama dan 2,8 juta dosis lengkap," katanya.

Kendati penanganan pandemi terus membaik, Menkominfo mengingatkan sejumlah pihak termasuk pelaku usaha harus tetap mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang ditentukan dalam aturan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 47 dan 48 Tahun 2021.

Terkait percepatan vaksinasi ini, Indonesia kembali mendatangkan 2.000.700 vaksin Pfizer dalam ketibaan tahap ke-87. Vaksin dalam bentuk jadi ini akan langsung didis-

tribusikan ke 12 provinsi. "Pembelian vaksin ini untuk menjaga stok vaksin di Tanah Air. Saat ini vaksin yang diterima Indonesia 280.527.920 vaksin baik dalam bentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi," ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi. Vaksin tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda.

Menurut Nadia, Pemerintah terus mengoptimalkan percepatan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia, sehingga bisa menyentuh sampai masyarakat terpencil dan terluar. "Pemerintah terus berupaya keras dalam mengamankan stok vaksin dan mempercepat distribusinya ke seluruh Indonesia termasuk distribusi yang dikirimkan langsung ke provinsi untuk mempercepat rantai distribusi dan mempercepat akses serta pemerataan berbagai jenis/merek vaksin bagi seluruh masyarakat," kata Nadia. **(San)-f**



KR-Antara/Aprillio Akbar

AKTIVITAS SAAT PPKM: Sejumlah warga berjalan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/10). Aktivitas warga di kawasan tersebut relatif ramai saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di ibukota.